

Ekonomika Pertanian Tembakau di Indonesia

Gelombang Ketiga Survei Petani Tembakau

Gumilang Aryo Sahadewo, Ph.D

Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada | gasahadewo@ugm.ac.id

Jeffrey Drope, Ph.D.

Health Policy & Administration, School of Public Health, University of Illinois at Chicago | jdroke@uic.edu

Firman Witoelar, Ph.D.

Crawford School of Public Policy, Australian National University | firmanwitoelar.kartaadipoetra@anu.edu.au

Qing Li, M.A., M.Ed.

qli1605@gmail.com

Raphael Lencucha, Ph.D.

Faculty of Medicine, School of Physical and Occupational Therapy, McGill University | raphael.lencucha@mcmcgill.ca



tobacconomics

Economic Research Informing
Tobacco Control Policy

Ringkasan Eksekutif

Sejumlah upaya telah dilakukan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan pengendalian tembakau yang progresif—seperti tarif cukai tembakau yang tinggi—untuk mengurangi beban penggunaan tembakau terhadap kesehatan manusia. Berbagai pihak yang menentang kebijakan tersebut, khususnya industri tembakau, secara konsisten berkilah bahwa kebijakan tersebut akan berdampak buruk terhadap sumber penghidupan pekerja di sektor tembakau, khususnya para petani tembakau. Sejumlah penelitian di berbagai negara memberikan bukti kuat yang mematahkan narasi simplistik ini. Berbagai studi tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga petani tembakau pada umumnya memperoleh keuntungan yang sedikit, bahkan mengalami kerugian serta kesulitan dalam menghadapi naik turunnya pendapatan secara

dramatis dari tahun ke tahun. Kebanyakan penelitian hanya memberikan gambaran singkat pada satu titik waktu tertentu tentang kondisi ekonomi dan penghidupan rumah tangga petani tembakau. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang mata pencaharian mereka, kita perlu mendalami lebih lanjut tentang dinamika pertanian tembakau dan non-tembakau dari waktu ke waktu.

Studi ini mengamati kelompok perwakilan yang sama dari rumah tangga petani tembakau aktif dan mantan petani tembakau di Jawa Tengah dan Jawa Timur selama empat tahun dan membandingkan median penghasilan rumah tangga antara kedua kelompok tersebut dari waktu ke waktu. Ketiga gelombang survei tersebut dilakukan bertepatan

Gambar ES-1. Median Total Penghasilan Rumah Tangga per Hektar dari Petani Tembakau dan Non-Tembakau Pada Semua Gelombang Survei



Notes: Sampel mencakup petani tembakau dan mantan petani tembakau di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pendapatan dari hasil panen didefinisikan sebagai penjualan hasil panen dikurangi input, biaya tenaga kerja upahan, dan biaya tenaga kerja rumah tangga. Pendapatan usaha tani tembakau adalah penjualan tembakau dikurangi input, biaya tenaga kerja upahan, dan biaya tenaga kerja rumah tangga. Untuk setiap gelombang survei dan untuk setiap kelompok tani, kami menghentikan pengamatan terhadap rumah tangga yang total penghasilannya lebih rendah dari persentil ke-5 dan lebih tinggi dari persentil ke-95. Total penghasilan rumah tangga didefinisikan sebagai penjualan hasil usaha tani ditambah penghasilan upah, penghasilan non-pertanian, dan penghasilan lainnya dikurangi biaya input, sewa, biaya tenaga kerja upahan, dan biaya tenaga kerja rumah tangga. Penghasilan pada gelombang survei kedua dan ketiga dilakukan penyesuaian terhadap inflasi. Total penghasilan rumah tangga per hektar didefinisikan sebagai total penghasilan rumah tangga per hektar dari total lahan yang digarap.

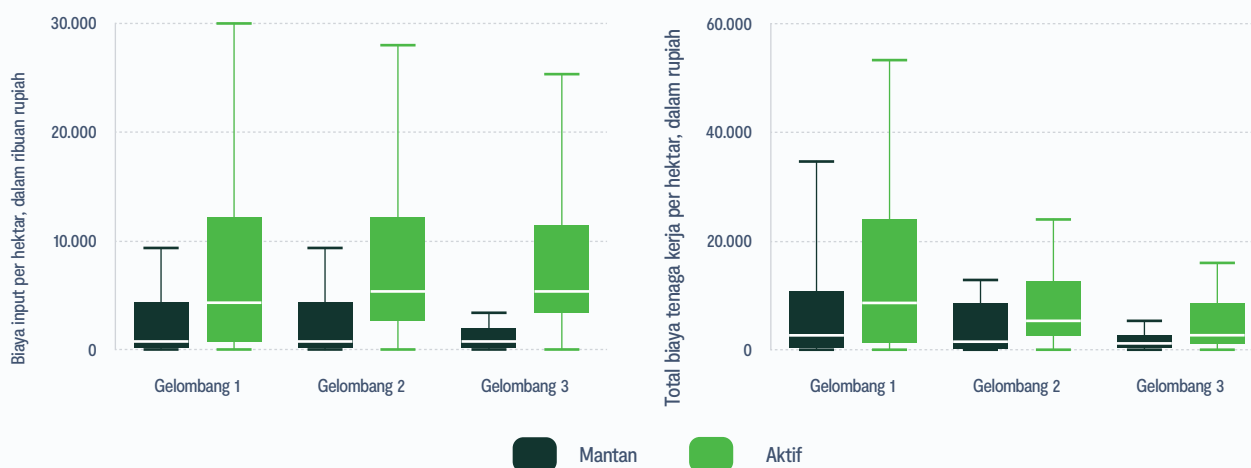
dengan kondisi tahun pertanian yang buruk secara keseluruhan (Gelombang 1) dan dua tahun kondisi pertanian yang lebih baik secara keseluruhan (Gelombang 2 dan Gelombang 3), dimana cuaca merupakan salah satu variabel utama yang memengaruhi hasil produksi petani. Studi ini mengumpulkan data dengan menggunakan survei rumah tangga komprehensif terhadap petani tembakau aktif maupun mantan petani tembakau. Hasil temuan memberikan bukti lebih lanjut yang menangkis narasi simplistik yang dibangun oleh industri tembakau dan memberikan pemahaman tentang aspek ekonomi dari pertanian tembakau.

Median penghasilan rumah tangga per hektar bagi rumah tangga petani tembakau dan non-tembakau ditunjukkan pada Gambar ES-1. Ditemukan bahwa petani tembakau dan non-tembakau berkinerja cukup baik dan memperoleh penghasilan yang positif pada musim tanam yang menguntungkan (Gelombang 2 dan 3). Namun, petani tembakau memperoleh penghasilan yang lebih sedikit dibanding mantan petani tembakau pada tahun-tahun pertanian

yang buruk (Gelombang 1), sehingga penghasilan yang diperoleh tidak begitu konsisten dari waktu ke waktu. Salah satu alasan yang mendasari hal ini adalah bahwa rumah tangga petani non-tembakau tidak terlalu bergantung pada penghasilan dari usaha tani. Mereka juga mengandalkan usaha pertanian dan non-pertanian, penghasilan dari upah, serta sumber pemasukan lainnya.

Bagi rumah tangga petani tembakau, biaya yang dikeluarkan lebih tinggi, baik untuk biaya input pertanian maupun biaya tenaga kerja, dibandingkan dengan rumah tangga petani non-tembakau. Rumah tangga petani tembakau secara konsisten mengeluarkan biaya pertanian per hektar yang jauh lebih tinggi pada semua gelombang survei (Panel A dari Gambar ES-2). Biaya tenaga kerja upahan per hektar juga secara konsisten lebih tinggi pada petani tembakau daripada petani non-tembakau dan lebih tinggi untuk petani tembakau di tahun yang buruk (Gelombang 1) daripada di tahun-tahun pertanian yang lebih baik (Panel B dari Gambar ES-2).

Gambar ES-2. Biaya per Hektar Petani Tembakau dan Petani Non-Tembakau Pada Semua Gelombang Survei



Berbagai bukti yang ditemukan dari penelitian survei yang menyeluruh ini menunjukkan bahwa petani tembakau akan lebih baik secara ekonomi jika beralih ke tanaman non-tembakau. Temuan-temuan utama dari laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Baik petani tembakau maupun non-tembakau memiliki sumber penghasilan dari usaha tani, usaha non-tani, upah, dan penghasilan lainnya. Rumah tangga petani tembakau biasanya lebih mengandalkan penghasilan dari usaha tani.

- Sebaliknya, sebagian besar mantan petani tembakau mengandalkan penghasilan dari berbagai usaha, upah, dan sumber pendapatan lain.
2. Usaha tani tembakau biasanya hanya memberikan kontribusi kecil terhadap penghasilan rumah tangga petani pada umumnya. Bagi lebih dari 85 persen petani tembakau, kurang dari separuh pendapatan mereka berasal dari usaha tani tembakau di tahun produksi pertanian yang buruk pada Gelombang 1. Bahkan di tahun-tahun yang lebih baik pada Gelombang 2 dan Gelombang 3, sekitar 70 dan 79 persen berturut-turut dari petani tembakau yang masih memperoleh kurang dari separuh pendapatan mereka dari budidaya tembakau.
 3. Pada umumnya, petani non-tembakau menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi daripada petani tembakau aktif. Pendapatan rumah tangga mantan petani tembakau yang lebih stabil dan lebih tinggi ini dapat dijelaskan antara lain oleh beragamnya portofolio sumber pendapatan, terutama upah dari usaha non-tani dan pendapatan lainnya.
 4. Pada umumnya, petani tembakau pada tahun pertanian yang buruk (Gelombang 1) tidak memperoleh total penghasilan rumah tangga per hektar yang positif. Hanya pada tahun-tahun baik pada Gelombang 2 dan 3, petani tembakau pada umumnya memperoleh total penghasilan rumah tangga per hektar yang positif. Di samping itu, terlepas dari perubahan kondisi pertanian di seluruh gelombang survei, mantan petani tembakau pada umumnya secara konsisten mendapatkan penghasilan yang positif.
 5. Penghasilan dari usaha tani tembakau yang lebih tinggi pada Gelombang 2 dan 3 dibandingkan dengan Gelombang 1 sebagian besar dijelaskan oleh volatilitas harga dan volume daun tembakau yang dijual. Median harga pada Gelombang 3 lebih rendah sekitar 24 persen daripada median harga pada Gelombang 2, tetapi median harga tersebut lebih rendah hanya sebesar 8,8 persen daripada median harga pada Gelombang 1. Median harga pada Gelombang 3 lebih rendah terutama untuk jenis daun Virginia dan Burley.
 6. Tingkat kemiskinan di kalangan petani tembakau jauh lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan nasional. Estimasi tingkat kemiskinan petani tembakau lebih rendah pada tahun-tahun pertanian yang baik (Gelombang 2 dan 3) dibandingkan pada tahun pertanian yang lebih buruk pada Gelombang 1. Cukup banyak petani tembakau dan mantan petani tembakau yang menerima bantuan sosial dalam berbagai bentuk, sehingga menambah beban bagi pemerintah.
 7. Perbedaan dalam biaya input per hektar yang dikeluarkan petani tembakau aktif dan mantan petani tembakau cukup besar. Pada Gelombang 3, petani tembakau menghabiskan biaya sekitar Rp6 juta per hektar untuk tanaman tembakau, sedangkan mantan petani tembakau menghabiskan kurang dari satu juta rupiah untuk tanaman non-tembakau. Pola ini terlihat sangat konsisten dari tahun ke tahun. Sekitar seperempat petani tembakau dilaporkan membutuhkan pinjaman untuk biaya input pertanian tembakau yang sebagian disebabkan karena tingginya biaya input tersebut.
 8. Pertanian tembakau merupakan usaha yang jauh lebih padat karya daripada pertanian non-tembakau. Pada Gelombang 3, rumah tangga petani tembakau yang tipikal (yaitu, median) secara umum menghabiskan waktu sebanyak 1.363 jam per hektar untuk pertanian tembakau tetapi hanya menghabiskan 197 jam per hektar untuk pertanian non-tembakau. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga petani tembakau menanggung biaya tenaga kerja rumah tangga yang jauh lebih besar. Perlu dicatat bahwa petani tembakau pada umumnya tidak memasukkan biaya tenaga kerja rumah tangga ke dalam perhitungan penghasilan mereka sehingga cenderung memberikan taksiran yang terlalu tinggi untuk penghasilan usaha tani tembakau mereka dari jumlah yang sesungguhnya.
 9. Selain itu, rumah tangga petani tembakau pada umumnya juga menghabiskan lebih banyak sumber daya untuk mengupah tenaga kerja di ladang tembakau mereka daripada sumber daya yang dihabiskan rumah tangga mantan petani tembakau

untuk usaha tani non-tembakau karena banyaknya jam kerja yang dibutuhkan untuk menanam tembakau.

10. Salah satu konsekuensi dari besarnya permintaan terhadap tenaga kerja dan rendahnya hasil keuntungan ini adalah pemanfaatan pekerja anak seperti yang terlihat dalam data kami. Pekerja anak—baik laki-laki maupun perempuan—terutama sangat lazim ditemukan dalam kegiatan pasca panen.

11. Melalui survei yang dilakukan, petani tembakau menyebutkan berbagai alasan tentang kesediaan mereka untuk beralih dari pertanian tembakau.

Secara konsisten pada seluruh gelombang survei, harga daun yang rendah disebut sebagai alasan utama dari kesediaan mereka untuk beralih dari tembakau. Pada Gelombang 3, sekitar 15 persen petani tembakau menyebut ketidakmampuan untuk menjual hasil panen mereka sebagai salah satu alasan utama. Yang penting untuk dicatat, sepertiga petani tembakau—lebih tinggi daripada proporsi yang ditemukan di Gelombang 1 dan Gelombang 2—mengatakan bahwa adanya alternatif yang lebih menarik merupakan alasan untuk beralih tanam, dan hal ini menunjukkan potensi untuk melakukan intervensi.

Rekomendasi

1. Pemerintah hendaknya **menyediakan layanan penyuluhan pertanian agar petani lebih memahami tentang berbagai tanaman komersial yang sesuai dengan kondisi lokal**. Layanan penyuluhan juga harus memperkenalkan petani pada teknologi pertanian yang lebih maju sehingga memungkinkan mereka untuk menghasilkan tanaman dagang yang berkualitas.
2. Melalui layanan penyuluhan pertanian, petani juga seharusnya diberikan berbagai **informasi terkait pasar, antara lain informasi tentang tanaman yang diminati pasar lokal dan sekitarnya**. Selain itu, layanan penyuluhan juga dapat memberikan informasi tentang harga berbagai tanaman. Informasi ini akan membantu petani untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam menentukan **portofolio tanaman** di setiap musim.
3. Pemerintah harus mengidentifikasi dan mengembangkan sumber air serta sistem irigasi yang andal dan memadai untuk pertanian non-tembakau di musim kemarau. Sejak awal masa kepresidenan Joko Widodo, pemerintah telah membangun sejumlah waduk. Pemerintah hendaknya terus membangun waduk strategis atau sumur air tanah dalam di daerah penghasil tembakau dan memastikan pasokan air yang andal selama musim kemarau untuk mendukung dan mendorong pertanian non-tembakau.
4. **Pemerintah harus mendorong pembentukan kelompok tani** lewat berbagai insentif. Pemerintah juga dapat menyediakan modal usaha melalui berbagai program yang tersedia seperti program Dana Desa. Kelompok tani dapat mendorong proses berbagi pengetahuan di antara sesama anggota. Anggota kelompok juga dapat bersatu untuk menjual hasil panen secara langsung ke pasar, sehingga menghilangkan pihak-pihak yang menjadi perantara dalam proses tersebut. Selain itu, para anggota dapat menyatukan sumber daya mereka agar memperoleh input pertanian dengan harga yang lebih murah, terutama pupuk.
5. Pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya, misalnya dari dana daerah atau dana desa, untuk membantu kelompok tani **mengembangkan rantai nilai untuk tanaman bersama**. Misalnya, pemerintah dapat melatih kelompok tani dalam mengembangkan usaha mikro untuk pengemasan dan pelabelan hasil panen mereka sebelum didistribusikan ke pasar lokal atau untuk mengolah hasil panen menjadi sesuatu yang bernilai lebih tinggi.
6. **Pemerintah dapat memberikan insentif finansial maupun non-finansial yang dikaitkan dengan budidaya tanaman non-tembakau**. Sebagai alternatif, pemerintah dapat memprakarsai program kredit khusus untuk mendanai usaha tani non-tembakau. Alternatif lainnya adalah memberikan input bersubsidi yang bersyarat sesuai dengan portofolio tanaman petani.

